

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir 2014:7). Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan (Harahap, 2008:105). Laporan keuangan yang disajikan perusahaan berisi informasi sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Disamping itu, banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan, seperti masyarakat, pemerintah, pemasok, kreditur, investor, pelanggan dan karyawan yang diperlukan secara tetap untuk mengukur kondisi dan efisiensi operasi perusahaan.

Menurut PSAK nomor 1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan dijadikan dasar bagi para stakeholder untuk mengambil keputusan haruslah dapat dipercaya dan memiliki informasi. Kebutuhan akan pentingnya keandalan informasi inilah yang mendorong dibutuhkannya jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan

manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka (Mulyadi,2002).

Ketika auditor menjalankan tugas pengauditan, independensi mutlak harus ada pada diri auditor karena mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Wajar jika pengguna laporan keuangan, regulator, dan pihak-pihak lain selalu mempertanyakan apakah auditor dapat independen dalam menjalankan tugasnya. Keraguan tentang independensi ini bertambah karena kantor akuntan publik selama ini diberi kebebasan untuk memberikan jasa non - audit kepada klien yang mereka audit. Pemberian jasa non-audit ini menambah besar jumlah dependensi secara finansial kantor akuntan kepada kliennya (Wijayanti, 2010)

Independensi auditor adalah kunci utama dari profesi auditor, termasuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Laporan keuangan yang diaudit terkadang menunjukkan sebagai produk negosiasi antara klien dengan auditor. Karena kenyataannya antara klien dan auditor mempunyai kepentingan yang saling menguntungkan. Auditor dibayar oleh perusahaan yang diaudit, dan klien membutuhkan hasil audit. Selanjutnya keduanya memperoleh keuntungan dari kekuatan hubungan yang berlangsung lama dengan kebersamaan (Yusi, 2006). Nasser, *et al.* (2006) berpendapat bahwa hilangnya independensi auditor dikarenakan auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Salah satu ancaman seperti itu adalah *audit tenure* yang panjang. *Audit tenure* yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk

mengembangkan “hubungan nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien mereka, yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam. *Audit tenure* yang panjang juga memberikan hasil familiaritas yang tinggi dan akibatnya, kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka mulai membuat asumsi asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi objektif dari bukti yang ada (Nasser, *et al.* 2006).

Adanya pergantian KAP (Kantor Akuntan Publik) dilator belakang oleh kasus di Amerika Serikat di tahun 2001 tentang runtuhnya KAP besar bernama Arthur Anderson. KAP Arthur Anderson membantu Enron untuk memanipulasi laba dan melakukan pemusnahan bukti yang berhubungan dengan audit Enron berupa ribuan surat elektronik dan dokumen lain yang akhirnya menjadi penyebab runtuhnya KAP tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh Arthur Anderson tidak sesuai dengan GAAP (Generally Accepted Accounting Principles dan GAAS (Generally Accepted Auditing Standard). KAP Arthur Anderson tidak bisa mempertahankan independensinya karena tidak bekerja dengan hati-hati sehingga informasi keuangan yang telah diauditnya tidak dapat dipercaya dan mengandung banyak keraguan. Wijaya (2013) menyatakan bahwa setelah adanya kasus Enron, para regulator di Amerika Serikat membuat peraturan baru yaitu SOX atau Sarbanes Oxley Act. Di dalam Sarbanes Oxley Act (SOX) mengatur mengenai jasa audit.

Dari kasus tersebut membuktikan banyaknya kasus manipulasi data keuangan yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Enron, Worldcom, Xerox dan lain-lain

yang pada akhirnya bangkrut, menyebabkan profesi akuntan publik banyak mendapat kritikan. Auditor dianggap ikut andil dalam memberikan informasi yang salah, sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan. Atas dasar banyaknya kasus tersebut, maka AICPA (1988) mensyaratkan bahwa auditor harus mengemukakan secara eksplisit apakah perusahaan klien akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai setahun kemudian setelah pelaporan. Meskipun auditor tidak bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup sebuah perusahaan tetapi dalam melakukan audit kelangsungan hidup perlu menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini.

Fenomena pergantian auditor telah ditemukan memiliki implikasi terhadap kredibilitas nilai laporan dan biaya monitoring aktivitas manajemen. Oleh karena itu, isu-isu mengenai pergantian auditor secara ekstensif diteliti di negara-negara maju diantaranya riset-riset di beberapa negara Asia seperti Hongkong, Singapore, Malaysia, dan Korea (Ismail, 2008).

Peraturan mengenai jasa audit di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 3 17/PMK.01/2008, di mana Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas untuk jangka waktu 6 (enam) tahun buku berturut-turut, sedangkan pemberian jasa audit oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, lalu diatur kembali dalam bentuk PP 20/2015. Jika sebelumnya, berdasarkan PMK 17/2008 sebuah KAP dibatasi hanya boleh melakukan audit laporan keuangan historis

perusahaan dalam 6 tahun berturut-turut dan AP dalam 3 tahun berturut-turut, maka berdasarkan PP 20/2015 ini tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Adapun pembatasan hanya berlaku untuk AP yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

Ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor pertambangan. Peneliti akan mencoba menganalisis faktor-faktor yang telah di pilih berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berpengaruh signifikan terhadap Pergantian KAP yang terjadi di perusahaan sektor pertambangan. Industri pertambangan digunakan sebagai sampel karena kebanyakan dari operasi perusahaan tambang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, maka dari itu ketaatan atas peraturan yang berlaku harus dinilai. Penyerapan modal dan tingkat investasi yang tinggi membutuhkan auditor eksternal untuk menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan pertambangan. Terlebih lagi terdapat beberapa kasus di perusahaan pertambangan yaitu pada PT. Bumi Resource yang menggelapkan dana pajak di Indonesia dan ditemukan beberapa kejanggalan pada PT. Perdana Karya Perkasa yang mengalami penurunan total asset selama tahun penelitian serta mengalami peningkatan kesulitan keuangan (*Financial Distress*). Dan juga perusahaan ini mengganti auditornya setiap tahun selama tahun penelitian.

Di Indonesia, Setyorini dan Ardiati (2006) meneliti fenomena pergantian auditor yang dihubungkan dengan kondisi *Financial Distress*, *qualified opinion*, perubahan manajemen, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil penelitian tersebut

menunjukkan fakta potensi kebangkrutan perusahaan publik tidak mempengaruhi pergantian auditor. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi adalah: pertama, di Indonesia, perusahaan-perusahaan akan mempertimbangkan secara serius tentang masalah pergantian auditor karena auditor yang selama ini mereka gunakan telah mengetahui dan mengerti kondisi perusahaan. Jika perusahaan mengganti auditor, perusahaan khawatir jika auditor yang baru akan melakukan pemeriksaan terhadap sistem pembukuan dan menilai rendah standarmutu pembukuan perusahaan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan penyajian laporan keuangan yang membuat perusahaan menanggung biaya denda keterlambatan. Kedua, adanya benturan kepentingan pada auditor dalam melaksanakan tugas audit dan memberikan jasa konsultasi. Benturan kepentingan ini dapat mengganggu independensi auditor yang akan mempengaruhi opini audit. Perusahaan di Indonesia merasa hal tersebut dapat memberikan keuntungan, sehingga perusahaan enggan melakukan pergantian auditor.

Carey et al. dalam Sudarno dan Sulistiarni (2012) menyatakan: “Proporsi kepemilikan saham non keluarga yang meningkat dapat menimbulkan permintaan monitoring dan audit yang berkualitas”. Guedhami et al. dalam Sudarno dan Sulistiarni (2012) menyatakan: “Kepemilikan saham menyebar mempunyai pengaruh penting untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas tinggi yang diwujudkan dalam pemilihan auditor dari KAP”. Sudarno dan Sulistiarni (2012) menyatakan: “Kepemilikan saham oleh masyarakat berakibat timbulnya tuntutan dari

masyarakat akan audit yang berkualitas, sehingga mendorong perusahaan untuk berganti auditor ke KAP yang berkualitas”.Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik secara *voluntary* (sukarela) yaitu diluar KMK No.17/PMK.01/2008. Beberapa faktor yang mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik antara lain : Ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, *Financial Distress* (Kesulitan Keuangan) dan Kepemilikan institusional.

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebuah organisasi yang memberikan pelayanan jasa akuntansi profesional kepada perusahaan atau masyarakat. Salah satu jasa yang diberikan oleh KAP adalah jasa audit umum atas laporan keuangan perusahaan. Dalam melakukan jasa ini KAP akan melakukan penilaian terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Ukuran KAP dapat dilihat dari berbagai hal yang terkait dengan KAP, seperti jumlah klien dan jumlah pendapatan KAP tersebut. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP merupakan pembedaan KAP yang didasarkan pada jumlah klien, jumlah anggota, dan jumlah pendapatan dari KAP tersebut.

Ukuran klien merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal dalam masyarakat.

Dari ketiga variabel ini, nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini ukuran perusahaan klien diukur dari total asset Menurut Saiful dan Erliana (2010).

Financial Distress (Kesulitan Keuangan) adalah dimana suatu keadaan perusahaan sedang mengalami keuangan yang tidak sehat ataupun kesulitan keuangan. Tandanya perusahaan yang sedang dalam kondisi keuangan yang tidak sehat bisa dilihat laporan keuangannya.

Tingginya kepemilikan oleh investor institusional mendorong aktivitas monitoring karena besarnya kekuatan voting mereka yang akan mempengaruhi kebijakan manajemen termasuk dalam memilih auditor, di mana auditor independen memiliki peranan penting dalam proses monitoring agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipercaya. (Suparlan dan Andayani , 2010)

Mega Octaviani (2014) meneliti Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik (*Auditor Switching*) Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013 dengan variabel independennya yaitu kantor akuntan publik, ukuran perusahaan klien, opini audit dan pergantian manajemen (CEO). Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan klien dan ukuran KAP

berpengaruh pada *Auditor Switching* sedangkan opini audit dan pergantian manajemen (CEO) tidak berpengaruh pada *Auditor Switching*.

Hasil penelitian yang dilakukan Mega Octaviani (2014) ini tidak konsisten atau berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Menurut hasil penelitian Anggraini (2012) membuktikan bahwa ukuran perusahaan klien dan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching* sedangkan menurut hasil penelitian Mega Octaviani (2014) ukuran perusahaan klien dan ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Hasil Penelitian Sulfiah (2011) membuktikan opini audit berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching* sedangkan Mega Octaviani (2014) membuktikan opini audit tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Hasil penelitian Wijayani dan Januarti (2011) juga Sulfiah (2011) membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching* sementara hasil penelitian Mega Octaviani (2014) pergantian manajemen tidak berpengaruh pada *Auditor Switching*.

Karena ketidakkonsistenan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian berpedoman dari Mega Octaviani (2014) dengan mengganti objeknya pada perusahaan Pertambangan (data diolah dari www.idx.co.id) serta mengganti variabel opini audit dan Pergantian manajemen yang tidak berpengaruh dalam penelitian Mega Octaviani (2014) dengan variabel *Financial Distress* (kesulitan keuangan) dan kepemilikan institusional dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini juga bermaksud menguji kembali sejauh

mana ukuran kantor akuntan publik, ukuran perusahaan klien, *financial distress* (Kesulitan Keuangan) dan kepemilikan institusional mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan Pertambangan Periode 2014-2016.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan serangkaian kegiatan penelitian dengan judul : **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik (*Auditor Switching*) Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2016)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia;
2. Bagaimana Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia;
3. Bagaimana Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia;
4. Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia;

5. Bagaimana pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan Klien, *Financial Distress* dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan bukti empiris Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh pada Pergantian Kantor akuntan publik terhadap perusahaan Pertambangan di Indonesia;
- b. Untuk mendapatkan bukti empiris Apakah Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh pada Pergantian Kantor akuntan publik terhadap perusahaan Pertambangan di Indonesia;
- c. Untuk mendapatkan bukti empiris Apakah *Financial Distress* berpengaruh pada Pergantian Kantor akuntan publik terhadap perusahaan Pertambangan di Indonesia;
- d. Untuk mendapatkan bukti empiris Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh pada Pergantian Kantor akuntan publik terhadap perusahaan Pertambangan di Indonesia.
- e. Untuk mendapatkan bukti empiris Apakah Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan Klien, *Financial Distress* dan Kepemilikan Institusional

Terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya dibidang auditing dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan Klien, Kondisi Keuangan (*Financial Distress*) dan Kepemilikan Institusional terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan-temuan dari penelitian sebelumnya.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan Klien, Kondisi Keuangan (*Financial Distress*) dan Kepemilikan Institusional terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik sebagai kajian dalam bidang akuntansi, khususnya auditing.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel. Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini dikemukakan secara garis besar mengenai sejarah singkat perusahaan dan aktivitas perusahaan.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan Klien, *Financial Distress* Dan Kepemilikan Institusional Perusahaan klien terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB VI PENUTUP

Bab ini akan dilakukan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan akan disampaikan pula saran bagi pihak-pihak terkait.

